

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Anwar, Moch .(Daading), 1990, *Hukum Pidana di bidang Ekonomi*, Bandung: PT. CITRA ADITYA BAKTI.
- Chibro, Sounir, 1992, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*, Cetakan II, Jakarta:Sinar Grafika.
- Gunawan,Ilham dan M. Martinus, Syahrani, 2002, *Kamus Hukum*, Jakarta: Restu Agung.
- Hamzah, Andi, 1985, *Delik Penyelundupan*, Jakarta:C.V AKADEMIKA PRESSINDO.
- Lopa, Baharuddin, 1990, *Tindak Pidana Ekonomi Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan*, Cetakan III, Jakarta:PT Pradnya Paramita.
- _____, 2002, *Tindak Pidana Ekonomi*, Jakarta: PT.Pradnya Paramita.
- Marpaung, Laden., 1991, *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pemecahan*, Jakarta:Gramedia Pustaka Utama.
- Prakoso Djoko, Riyadi Bambang Lany dan Muhsin Amir, 1987, *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Cetakan I, Jakarta:Bina Aksara.
- Purwito, Ali M, 2010, *Kepabeanan dan Cukai Pajak Lalu Lintas Barang Konsep dan Aplikasi*, Cetakan IV, Kajian Hukum Fiskal FHUI.
- Riduwan, 2004, *Metode Riset*, Jakarta:Rineka Cipta.
- Sutarto, Eddhi, 2009, *Rekonstruksi Sistem Hukum Pabean Indonesia*, Jakarta: Erlangga.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Waluyo, Bambang, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wibowo, Yudi, 2013, *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Perundang-Undangan :

RI, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

RI, Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.

RI, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

RI, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

RI, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan Dan Cukai.

RI, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 37/KMK.04/2002.

RI, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.04/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat.

RI, Peraturan Dirjen Bea dan Cukai No.P-53/BC/2010 tentang tatalaksana Pengawasan.

RI, Surat Edaran Nomor: SE-06/BC/2003 tentang Tatakerja Penatausahaan Dokumen Impor, Penatausahaan Barang Yang Tidak dikuasai, Dikuasai Negara, Dan Milik Negara dan Penatausahaan Penerimaan Negara huruf A tentang Penatausahaan Dokumen Impor nomor 7 tentang Penatausahaan Dokumen Pengangkutan Barang Impor dari Kawasan Pabean ke Tempat Penimbunan Berikat (BC 2.3).

Internet :

<http://customslawyer.wordpress.com/2014/05/14/pengertian-dan-sanksi-tindak-pidana-penyelundupan/>, diunduh Senin, 14 Juli 2014, Pukul 20.52.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, id.m.wikipedia.org/wiki/impor, diakses Senin, 17 November 2014, Pukul 15.04.

<http://beristatus.blogspot.com/2013/03/macam-macam-sistem-ekonomi-di-indonesia.html>, diunduh Jumat, 13 Maret 2015, Pukul 02.03.